



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
5. Para Gubernur.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Presiden ini.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Dalam pelaksanaan Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

1. mengoordinasikan penyusunan arah dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional; dan
2. mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, melalui:

1. simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
2. kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta; dan
3. kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.

KELIMA : Dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEENAM : Dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT:

1. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Menteri Perhubungan:
 - a. mengintegrasikan sistem perizinan dan layanan ekspor, impor, dan logistik di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia *National Single Window* (INSW); dan
 - b. melakukan penataan tata ruang kepelabuhan serta jalur distribusi barang.

2. Menteri Perdagangan:
 - a. mengintegrasikan sistem pengajuan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia *National Single Window* (INSW); dan
 - b. mengintegrasikan proses bisnis pelaporan perdagangan antar pulau dengan proses bisnis keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkut dalam sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia *National Single Window* (INSW).

3. Menteri Perindustrian menyederhanakan proses bisnis untuk mengintegrasikan sistem pengajuan persyaratan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perindustrian dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia *National Single Window* (INSW).

4. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

5. Para ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Para Gubernur melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri Keuangan:

1. berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; dan
2. dapat melibatkan partisipasi pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

KEDELAPAN : Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkannya kepada Presiden.

KESEMBILAN : Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/ lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL

**RENCANA AKSI
PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL TAHUN 2020-2024**

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
1.	Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi	a. Menyederhanakan proses pemeriksaan barang oleh instansi yang berwenang di pelabuhan melalui penerapan Sistem <i>Single Submission</i> (SSm) yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kepabeanan dan karantina secara terpadu (<i>joint inspection</i>)	Penerapan Sistem SSm Kepabeanan dan Karantina secara bertahap	Juni 2020	Kementerian Keuangan	a. Kementerian Pertanian b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. Mempermudah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		b. Mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi sistem-sistem pemerintah di bidang kegiatan logistik melalui:				
		a) Mengolaborasikan sistem layanan pengajuan manifes, pemberitahuan keberangkatan, dan pemberitahuan kedatangan kapal baik internasional maupun domestik	a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) oleh K/L yang terkait dengan proses pemberitahuan keberangkatan dan kedatangan kapal melalui Sistem SSm Pengangkutan	September 2020	Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perhubungan b. Kementerian Pertanian c. Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Kementerian Perdagangan e. Kementerian Kesehatan
			b. Terlaksananya uji coba manifes domestik antarpulau yang diangkut melalui laut dalam rangka pengawasan Sumber Daya Alam dengan	September 2020		

mekanisme ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
			mekanisme Sistem SSm (<i>piloting</i> terbatas)			
			c. Terlaksananya uji coba penyampaian warta kapal, manifes kepabeanan, izin karantina kesehatan, dan manifes domestik antarpulau yang diangkut melalui laut dengan mekanisme Sistem SSm (<i>piloting</i> terbatas)	September 2020		
			d. Terlaksananya <i>piloting</i> Sistem SSm Pengangkutan mulai dari warta kapal	Maret 2021		

e. Terlaksananya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
			e. Terlaksananya <i>piloting</i> Sistem SSm Pengangkutan mulai dari penunjukan keagenan kapal	Maret 2022		
			f. Penerapan SSm Pengangkutan Laut secara nasional	Maret 2023		
		b) Mengolaborasikan sistem-sistem K/L terkait penyampaian manifes, pemberitahuan kedatangan, dan pemberitahuan keberangkatan pengangkut udara	a. Peta proses bisnis pengangkutan udara	Desember 2021	Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perhubungan
			b. Pelaksanaan <i>piloting</i> Sistem SSm Pengangkutan Udara	Desember 2022		b. Kementerian Pertanian
			c. Penerapan Sistem SSm Pengangkutan Udara secara nasional	Maret 2023		c. Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Kementerian Perdagangan e. Kementerian Kesehatan

c) Penerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		c) Penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi antar K/L untuk penyederhanaan proses perizinan ekspor dan impor	a. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan terkait prosedur perizinan ekspor dan impor untuk pengguna jasa yang mempunyai profil yang baik (<i>reputable trader</i>)	Juni 2020	Kementerian Perdagangan	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Perhubungan c. Kementerian Pertanian d. Kementerian Kelautan dan Perikanan e. Kementerian Kesehatan f. Kementerian Perindustrian g. BPOM h. Kepolisian RI i. BKPM j. Instansi penerbit perizinan lainnya
			b. Pemanfaatan informasi dan profil pengguna jasa layanan pemerintah (<i>Single Stakeholder Information and Profile</i>) oleh salah satu K/L untuk penyederhanaan proses bisnis terkait kegiatan logistik	Desember 2020	Kementerian Keuangan	

d) Mengolaborasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		d) Mengolaborasikan sistem-sistem K/L yang terkait dengan perizinan ekspor dan impor melalui mekanisme Sistem SSm	a. Pelaksanaan <i>piloting</i> Sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPOM, dan Kementerian Kesehatan	Januari 2021	Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perdagangan b. Kementerian Perhubungan c. Kementerian Pertanian d. Kementerian Kelautan dan Perikanan e. Kementerian Kesehatan
			b. Pelaksanaan <i>piloting</i> Sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan K/L penerbit perizinan lainnya	Januari 2022		f. Kementerian Perindustrian g. BPOM h. Kepolisian RI i. BKPM j. Instansi penerbit perizinan lainnya

2. Kolaborasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
2.	Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antarpelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta	Meningkatkan efisiensi proses logistik dengan fasilitasi akses layanan logistik melalui kolaborasi platform-platform logistik, meliputi:				
		a. Sektor Transportasi				
		Membangun platform kolaborasi yang memungkinkan pengguna jasa untuk melakukan pemesanan truk dalam rangka pengangkutan barang	a. Terlaksananya pemesanan truk untuk pengangkutan barang impor/ekspor dari/ke pelabuhan dan pemasukan/ pengeluaran barang ke/dari Tempat Penimbunan Berikat	Juni 2020	Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perhubungan b. Kementerian BUMN
		b. Terlaksananya pemesanan truk secara online untuk pengangkutan/ <i>trucking</i> dalam negeri		September 2020		

e. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
			c. Peningkatan jumlah perusahaan truk yang tergabung dalam platform kolaborasi	Desember 2021		
		b. Sektor Pelayaran (<i>Shipping</i>)				
		a) Membangun platform kolaborasi yang memungkinkan pengguna jasa untuk mengakses layanan permintaan, pembayaran, sampai penyerahan (<i>Delivery Order/D/O</i>) secara <i>online</i>	a. Terlaksananya uji coba layanan permintaan, pembayaran, sampai penyerahan (layanan D/O)	Juni 2020	Kementerian Keuangan	Kementerian Perhubungan
			b. Terlaksananya layanan D/O secara <i>online</i> melalui platform kolaborasi	Juni 2020		

c. Terlaksananya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
			c. Terlaksananya layanan D/O secara <i>online</i> melalui platform kolaborasi pada 5 (lima) pelabuhan besar	Desember 2020		
		b) Membangun platform kolaborasi yang memungkinkan pengguna jasa untuk melakukan pemesanan tempat di kapal secara <i>online</i>	a. Proses bisnis terkait jadwal kapal, ketersediaan tempat, pemesanan tempat yang di sesuaikan dengan proses pemesanan truk untuk kegiatan ekspor	Juni 2020		
			b. Tersedianya <i>dashboard</i> jadwal dan ketersediaan tempat di kapal serta fitur pemesanan tempat di kapal pada platform kolaborasi	Juni 2020		

c. Sektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		c. Sektor Pelabuhan				
		Membangun platform kolaborasi yang memungkinkan pengguna jasa untuk mendapatkan layanan penerbitan dokumen penyerahan peti kemas dari operator terminal (layanan penyerahan peti kemas) secara <i>online</i>	a. Terlaksananya uji coba layanan penerbitan dokumen penyerahan peti kemas dari operator terminal (layanan penyerahan peti kemas) secara <i>online</i>	Juni 2020	Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perhubungan b. Kementerian BUMN
			b. Terlaksananya layanan penyerahan peti kemas dan layanan penyerahan peti kemas di platform kolaborasi	Desember 2020		

005/2020

d. Sektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		d. Sektor Pergudangan (<i>Warehousing</i>)				
		Membangun platform yang mengolaborasikan layanan pergudangan	a. Terintegrasinya platform kolaborasi dengan salah satu platform pergudangan yang memungkinkan pengguna jasa untuk mencari informasi tempat yang tersedia di gudang beserta tarif sewa gudang dan melakukan pemesanan tempat di gudang	Desember 2020	Kementerian Keuangan	Kementerian Perdagangan
			b. Peningkatan jumlah perusahaan pergudangan yang tergabung dalam platform kolaborasi	Maret 2021		

e. Sektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		e. Sektor Depo Peti Kemas				
		Membangun platform yang mengolaborasikan layanan depo penimbunan peti kemas	a. Terkolaborasinya salah satu platform depo penimbunan peti kemas dengan platform kolaborasi	Desember 2020	Kementerian Keuangan	Kementerian Perhubungan
			b. Peningkatan jumlah perusahaan depo penimbunan peti kemas yang tergabung dengan platform kolaborasi	Desember 2021		
		f. Kolaborasi <i>end to end</i>				
		a) Menerapkan satu siklus <i>inbound</i> dalam Platform NLE (mulai dari layanan D/O, layanan penyerahan peti kemas	a. Terlaksananya uji coba satu siklus <i>inbound</i> melalui platform kolaborasi	September 2020	Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perhubungan b. Kementerian BUMN

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		dan pemesanan truk)	b. Terlaksananya satu siklus <i>inbound</i> melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama	Desember 2020		
		b) Menerapkan satu siklus <i>outbound</i> melalui platform kolaborasi (pemesanan tempat kapal, penerbitan NPE, dan pemesanan truk)	Terlaksananya uji coba satu siklus <i>outbound</i> melalui platform kolaborasi	Desember 2022		
		c) Menerapkan satu siklus <i>outbound</i> dan <i>inbound</i> melalui platform kolaborasi	Terlaksananya satu siklus <i>inbound</i> dan <i>outbound</i> melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama	Desember 2022		

3. Kemudahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
3.	Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha terkait proses logistik	Meningkatkan efisiensi proses logistik dengan fasilitasi akses layanan pembayaran melalui platform pembayaran <i>online</i> dengan tahapan:			Kementerian Keuangan	a. Kementerian Perhubungan b. Kementerian BUMN
		a. Membangun platform yang mengolaborasikan platform-platform pembayaran secara <i>online</i>	a. Terlaksananya uji coba pembayaran secara <i>online</i> melalui platform pembayaran online untuk layanan <i>trucking</i> , layanan D/O, dan layanan penyerahan peti kemas	Juni 2020		
			b. Terlaksananya uji coba pembayaran secara <i>online</i> melalui Bank BUMN untuk layanan D/O dan layanan penyerahan peti kemas	Maret 2021		

e. Terlaksananya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
			c. Terlaksananya pembayaran <i>online</i> melalui platform kolaborasi	Juni 2021		
			d. Peningkatan jumlah sistem pembayaran <i>online</i> dalam NLE	November 2021		
		b. Menyederhanakan proses bisnis pembayaran penerimaan negara	a. Peta proses bisnis pembayaran perpajakan dan PNB	Juni 2021		
			b. Uji coba sistem pembayaran penerimaan negara yang disederhanakan melalui platform kolaborasi	Desember 2021		

4. Penataan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
4.	Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan, serta jalur distribusi	Meningkatkan efisiensi proses logistik dengan penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan melalui <i>One Gate, One Billing, and One System</i> di Pelabuhan Tanjung Priok, dengan tahapan:				Kementerian BUMN
		a. Penerapan sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh semua operator Terminal Peti Kemas (<i>One Billing System</i>)	Terlaksananya sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh semua operator Terminal Peti Kemas	Juni 2021	Kementerian Keuangan	
		b. Penerapan sistem pengoperasian tunggal oleh operator Terminal Peti Kemas (<i>One Gate and One System</i>)	Terlaksananya sistem pengoperasian tunggal operator Terminal Peti Kemas	Desember 2021	Kementerian Keuangan	

c. Penataan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		c. Penataan atau zonasi terminal peti kemas berdasarkan jenis kegiatan dan fungsi seperti FCL, LCL, Curah, <i>Dangerous Goods</i> , Kendaraan Bermotor, <i>Empty Container</i> , dan <i>Buffer Area</i>	Terlaksananya penataan atau zonasi Terminal Peti Kemas	Desember 2024	Kementerian Perhubungan	

d. Sinkronisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Target Waktu Penyelesaian	Instansi Penanggung jawab	Instansi Terkait
		d. Sinkronisasi jalur kereta api peti kemas	Terlaksananya sinkronisasi jalur kereta api peti kemas	Desember 2024	Kementerian Perhubungan	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit